



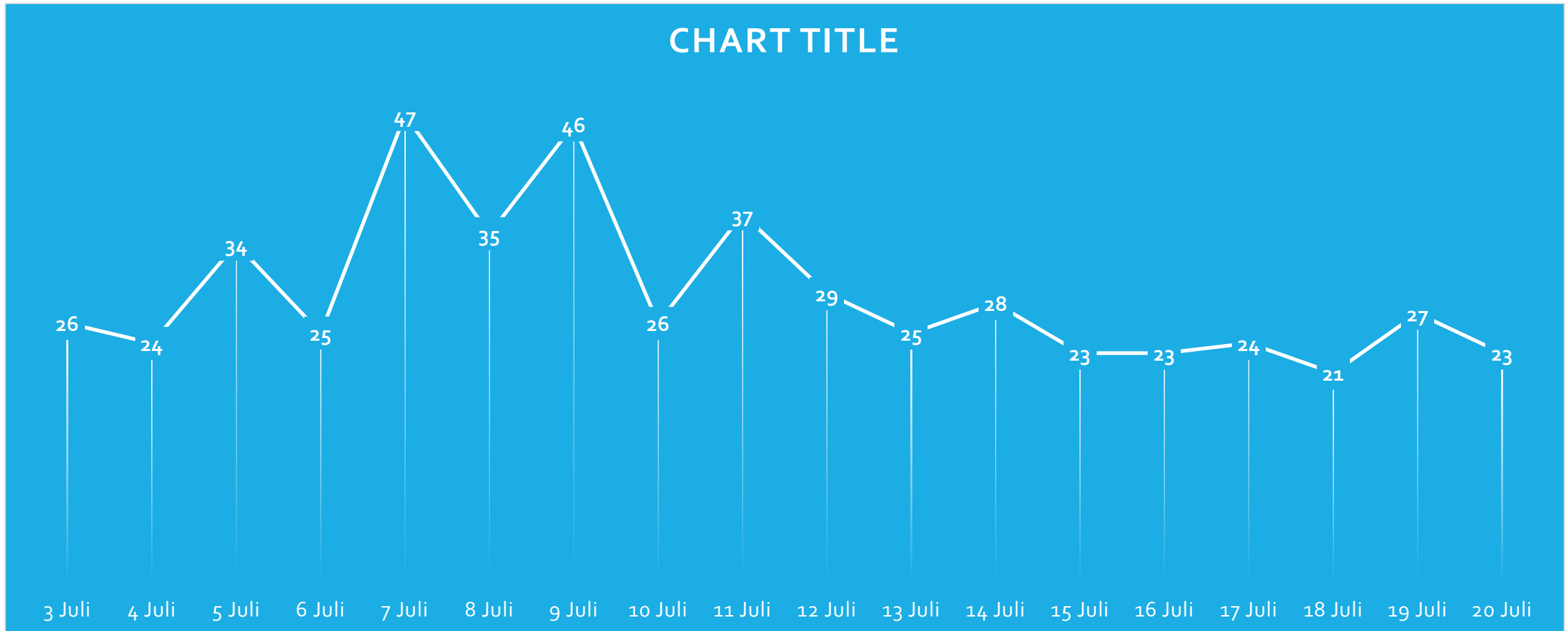
# LAPORAN WARGA DI MASA PPKM DARURAT

Periode 3-20 Juli 2021

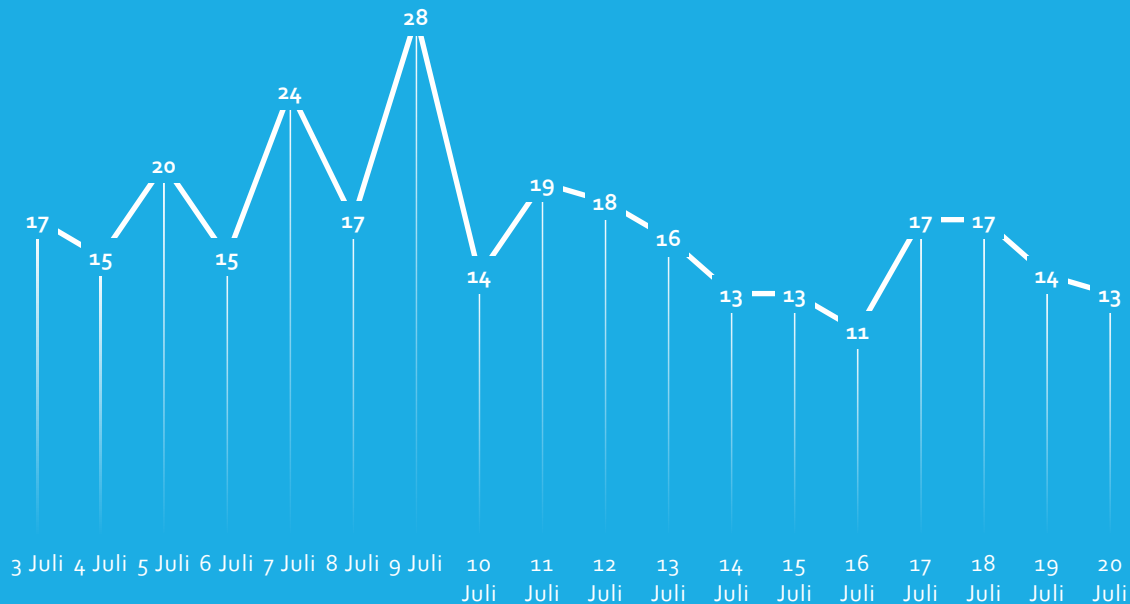
---

Yemiko Happy- LaporCovid19

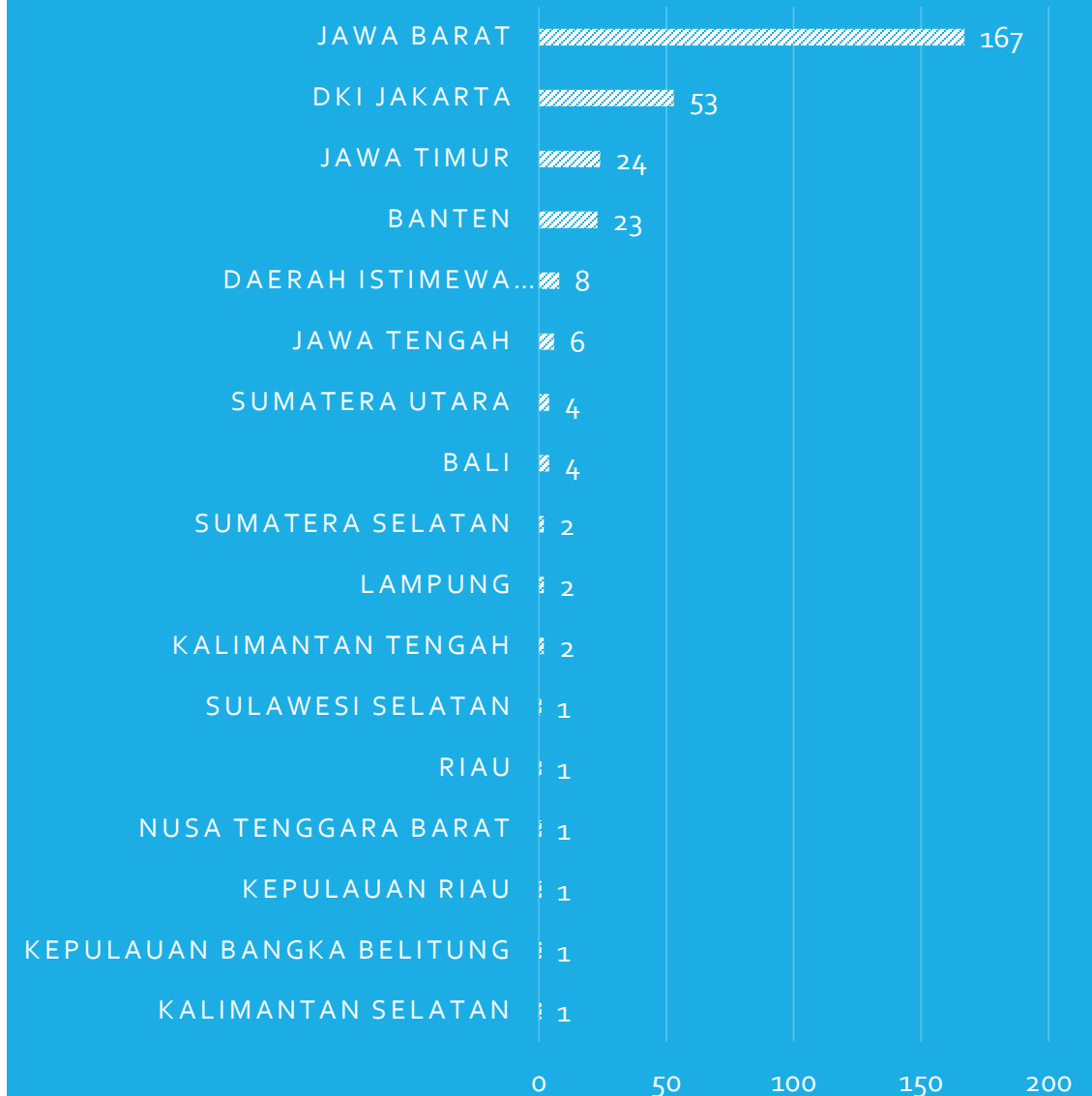
# LaporCovid menerima setidaknya 30 laporan per hari selama PPKM Darurat (n=523)



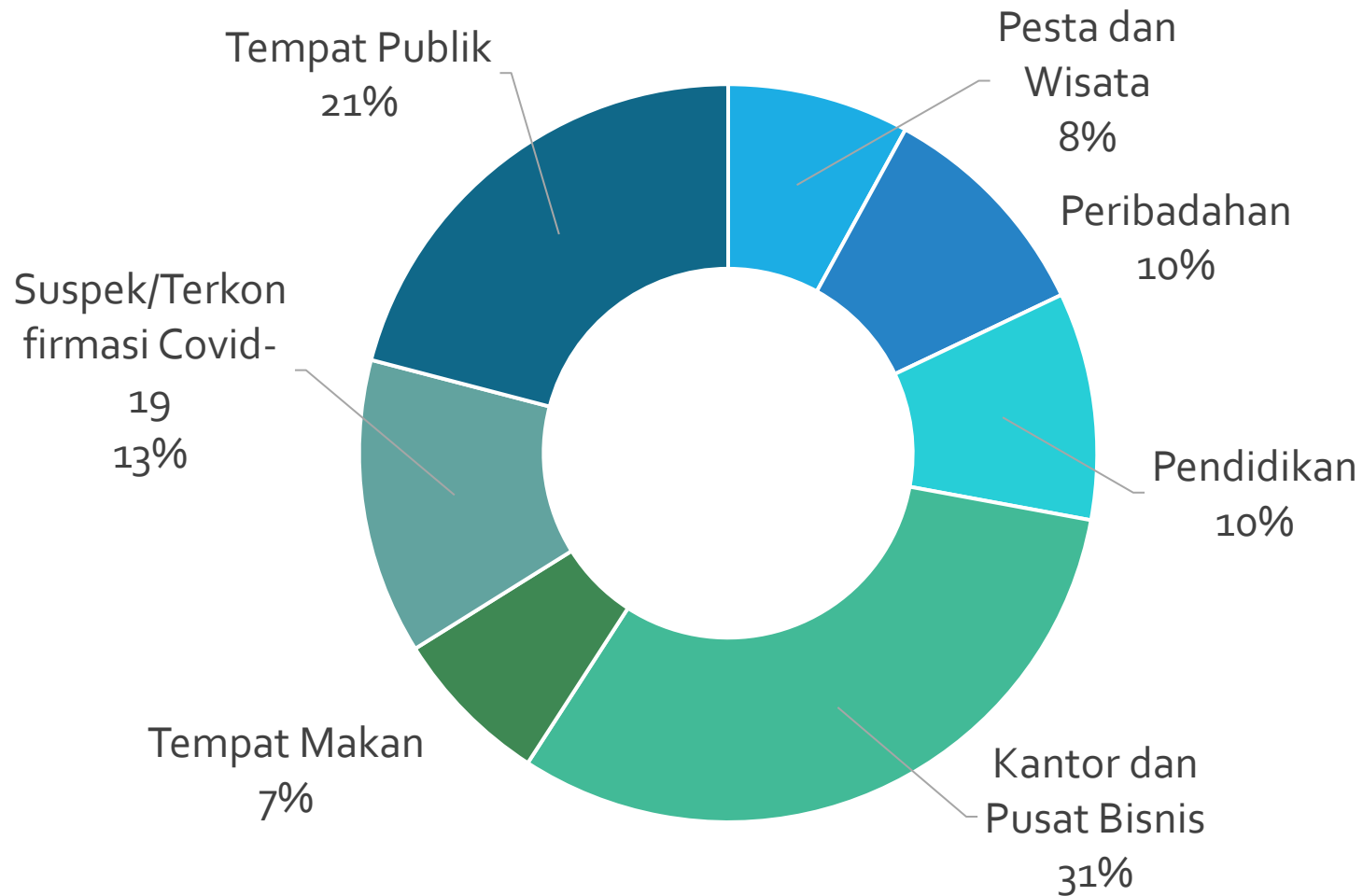
# PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN (n=301)



## SEBARAN LAPORAN



# Rekapitulasi Pelanggaran Protokol Kesehatan



1. Perkantoran dan Pusat Bisnis menjadi sektor terbesar yang dilaporkan oleh warga perihal pelanggaran protokol kesehatan.
2. Pelanggaran juga cukup banyak terjadi di tempat publik, seperti lapangan, pinggir jalan raya, dan tempat sejenis selama PPKM Darurat.
3. Individu atau kelompok yang terkonfirmasi positif tapi tidak isolasi mandiri juga meresahkan masyarakat.

# Contoh Laporan Warga

- Halo, saya ingin melaporkan Kemenko PMK karena mereka melanggar protokol PPKM Darurat. Saya tidak tinggal di Indonesia tapi khawatir dengan kondisi kerja keluarga saya. Untuk sektor non esensial, Kemenko PMK masih mewajibkan beberapa PNS untuk WFO dari Senin sampai Jumat padahal menurut keluarga saya, pekerjaan mereka bisa dilakukan dari rumah. Selama pandemi, tepatnya sebelum PPKM Darurat diberlakukan, Kemenko PMK juga masih sering mewajibkan pegawainya untuk traveling ke luar daerah (bisa 1-2 kali tiap bulan)
- Pada tanggal 19 Mei 2021 Bupati Toraja Utara menghadiri acara pernikahan, dalam acara pernikahan tersebut Bupati Toraja Utara tidak mematuhi protokol kesehatan, dan melanggar protokol kesehatan, yaitu tidak memakai masker, berkerumun, dan tidak jaga jarak. Pelanggaran kembali dilakukan pada 7 Juli. Bupati Toraja Utara melanggar protokol kesehatan berkerumun dan tidak memakai masker. Bupati Toraja Utara juga mengeluarkan surat mengizinkan acara adat dan acara lainnya yang mengumpulkan banyak orang di masa pandemi covid. Walaupun menggunakan protokol kesehatan, kegiatan non esensial ini tidak sepatutnya dilakukan ketika Virus Corona di Toraja Utara sudah semakin menyebar dan sudah banyak warga yang positif dan meninggal. Pemerintah Sulawesi Selatan tidak mau menanggapi dan merespon laporan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan.
- Sudah belasan orang terkena covid-19 tapi tidak ada upaya tes swab ataupun stelisasi kantor. Protokol kesehatan tidak dilakukan dengan disiplin, dan hanya dilakukan saat jam istirahat makan siang. Terlebih di area produksi karyawan saling berdekatan, bertukar barang, dan lain sebagainya untuk proses produksi. Karyawan yang mempunyai gejala tidak diperbolehkan untuk melakukan swab oleh HR. Mohon ditindaklanjuti karena ini beresiko tinggi terjadi kluster covid di kantor dan tidak ada perlindungan yang memadai bagi kesehatan karyawan

- Jakarta Pusat, 18 Juli 2021

- Toraja Utara, 16 Juli 2021

- Kab. Bekasi, 14 Juli 2021

# Data Pendukung: Survei Pekerja Perbankan

1. Sebanyak 734 responden (58 % sales staf; 42% non sales staff)
2. Total Bank : 19 Bank + 1 BPR  
Top 5 Responden : PermataBank (18%) Maybank Indonesia (16%) Bank Mandiri (11%) OCBC NISP (8%) Bank Danamon (7%)
3. Total Sebaran Kota : 15  
Kota Top 5 Kota : Jakarta (44%) Bandung (17%) Surabaya (12%) Medan (8%) Semarang (6%)

## Temuan

- Sales staff **wajib** WFO (79%), melakukan canvasing (80%), dinaikkan targetnya (65%)
- Non sales staf wajib masuk ke kantor (67%)
- Baik sales dan non sales bekerja di tengah sirkulasi udara kurang baik, wajib bekerja walau pun ada yg positif.
- Atasan tidak transparan tentang informasi Covid di Bank



**Lapor  
Covid-19**



# Data Pendukung: Serikat Buruh

## Data terbaru

1. FSERBUK: 287 orang
2. FSBPI: 66 orang
3. FBTPI: 65an orang
4. FSBM: 100an orang
5. GSPB: 1 orang

## Contoh Laporan

Selamat pagi, saya ingin melaporkan PT. BEP Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat atas)  
Laporan :

Indikasi pelanggaran prokes yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan:

- Banyak karyawan maupun buruh yang swab antigen dan hasilnya positif
- Penelusuran siapa saja yang kontak erat tidak langsung dilakukan tetapi operasional perusahaan tetap harus berjalan. pegawai yang berpotensi tertular dari karyawan yang positif dapat berinteraksi dengan siapa saja selagi belum ada tracing dari perusahaan.
- Penelusuran tidak dilakukan serentak kepada seluruh karyawan, akan tetapi hanya perdepartment / bagian yang ada karyawannya positif Swab PCR ataupun reaktif Rapid antigen, misalkan ada yang positif di bagian finance maka rapid antigen hanya diberikan kepada karyawan finance saja padahal yang positif/reaktif tersebut suka berinteraksi dengan karyawan selain departmentnya dipantry
- Penelusuran dilakukan bisa 2-3 hari kemudian setelah ada karyawan yang positif dikarenakan menunggu kuota minimal 30 orang yang akan di swab antigen
- Swab antigen dilakukan selalu sore hari setelah jam kerja berakhir walaupun dari pagi perusahaan sudah tahu kalau ada yang karyawan yang positif.

Apabila laporan saya ini memang melanggar prokes tolong segera di tindak lanjuti.

Saat ini seolah olah kami hanya menunggu giliran tertular Covid19 dari claster PT. Beton elemenindo Persada. TOLONG SELAMATKAN KAMI

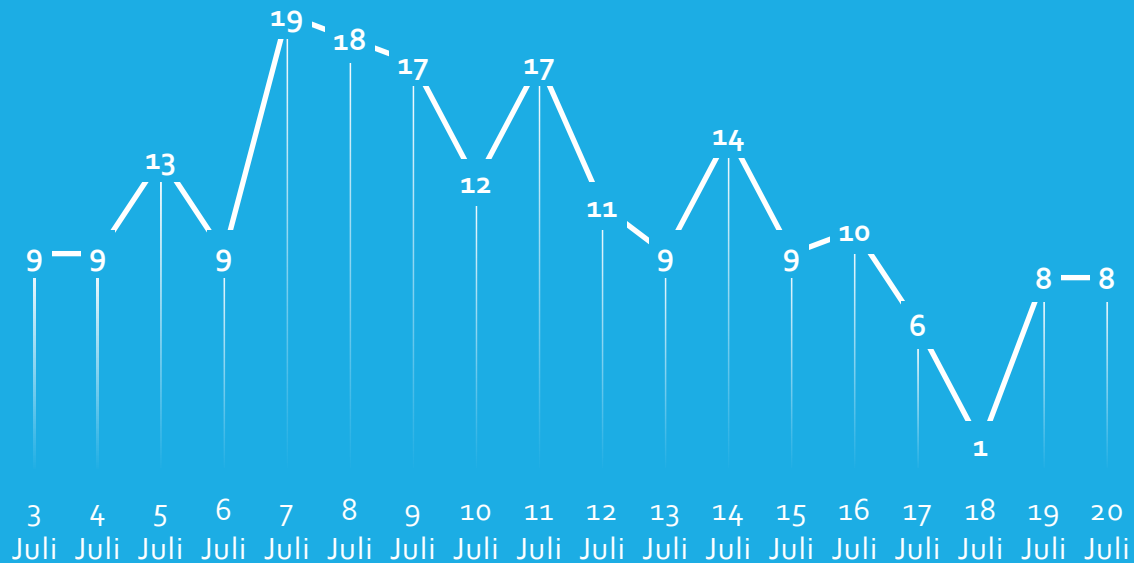
Terimakasih



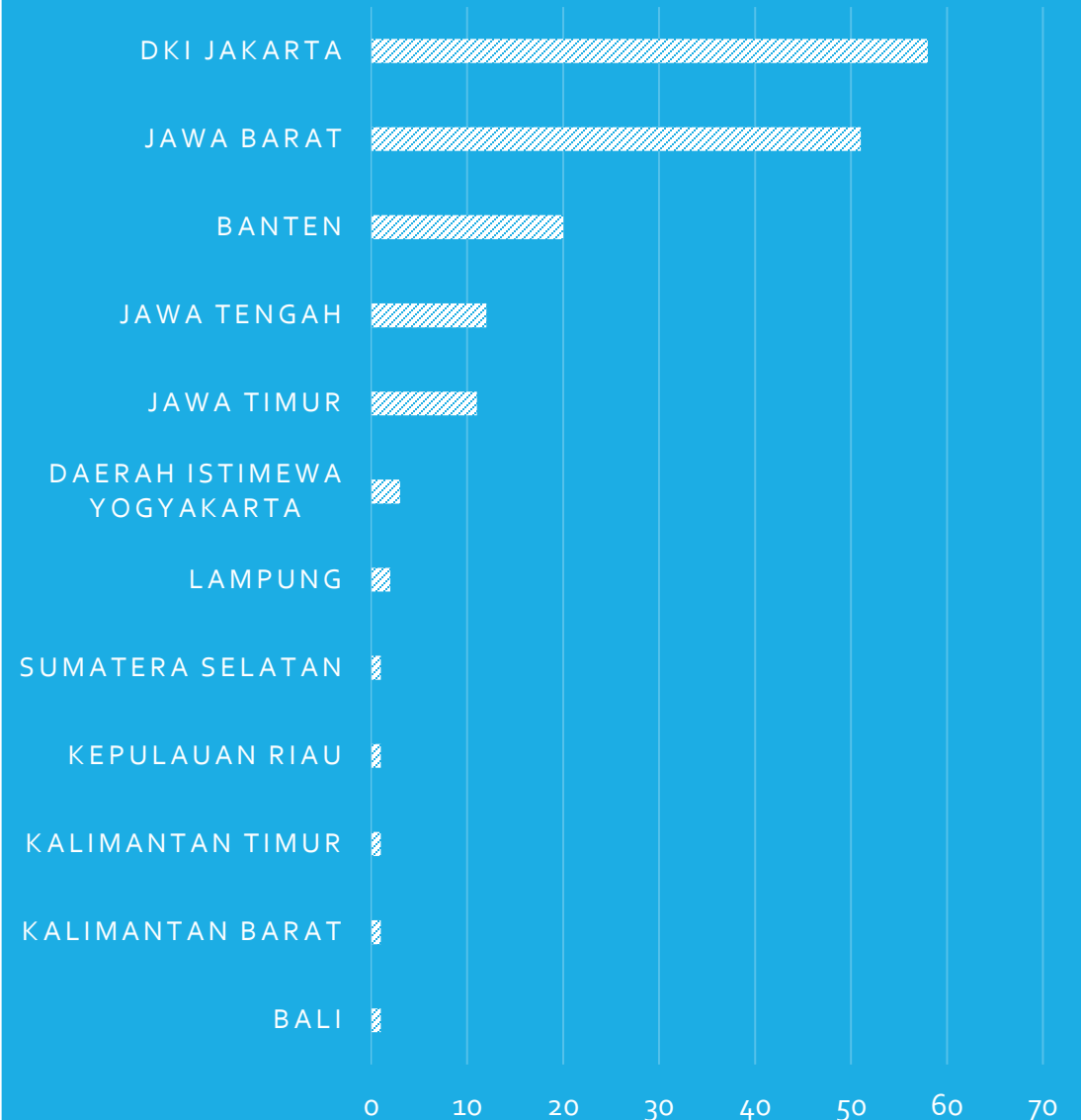
# KELUHAN MASYARAKAT

(n=199)

## REKAP HARIAN



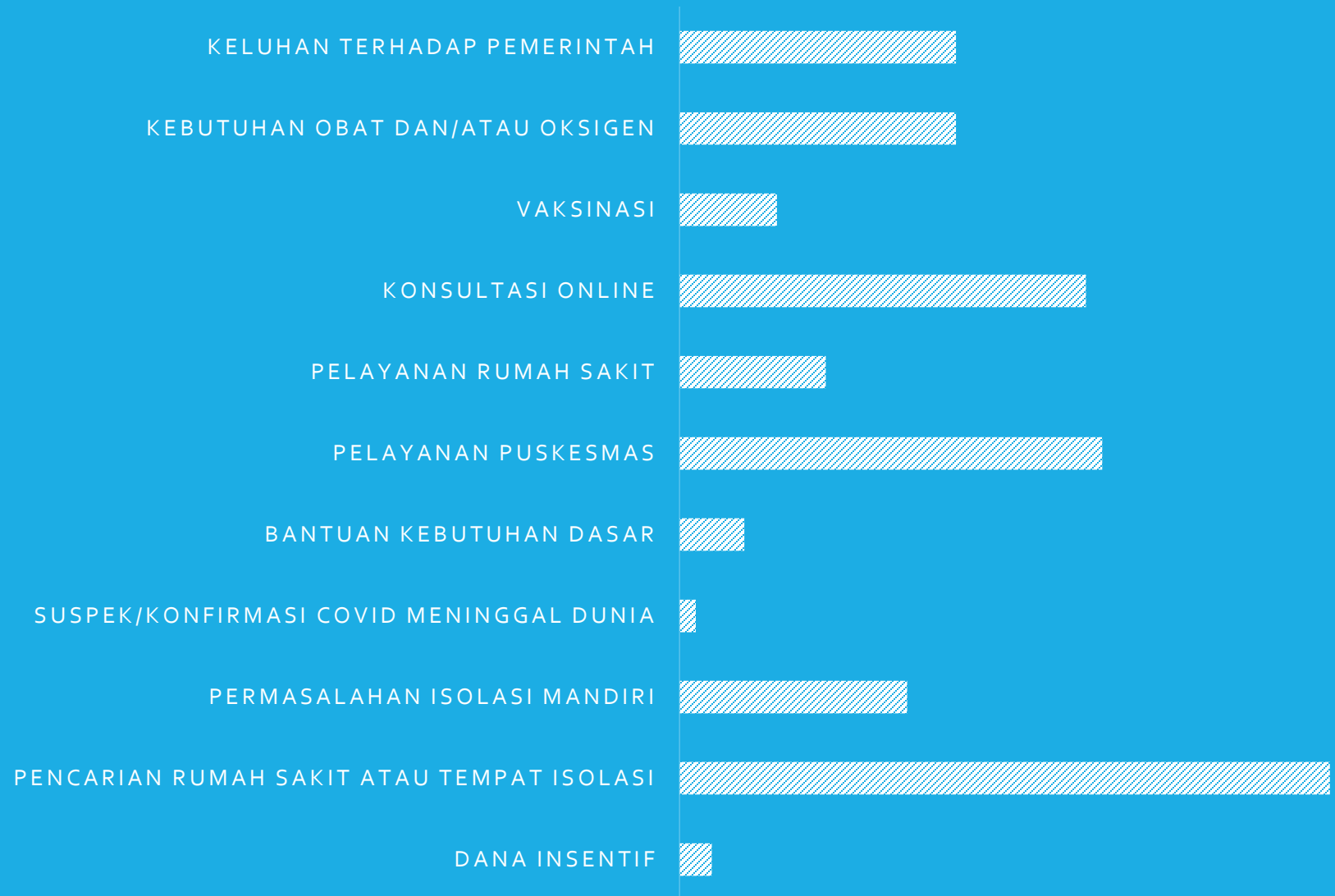
## SEBARAN LAPORAN



“Saya minta tolong utk bantuan rs manapun utk mama saya sekarang sudah 7 hari isoman kondisinya menurun trs dan mengandalkan oksigen. Sudah ke beberapa rs baik pagi-malam tetap disuru tunggu tanpa kejelasan, tanpa informasi/ pencatatan apapun”  
- Tangerang, 3 Juli 2021

“SAYA ISOMAN TAPI GA DAPAT OBAT DARI PEMERINTAH”  
- Tangerang, 17 Juli 2021

## REKAP KELUHAN WARGA



# STIGMA

(n=8)

Tetangga dan saudara di sekitar rumah kami masih sangat melihat orang yg sakit covid sbg aib. Yg sakit akan dikucilkan dan dijadikan bahan pembicaraan.

Tdk banyak yg dilakukan pihak rt dan rw atau perangkat kampung. Tetapi stigma ini tentu jd silent killer bagi kami, yg sedang berjuang untuk sembuh.

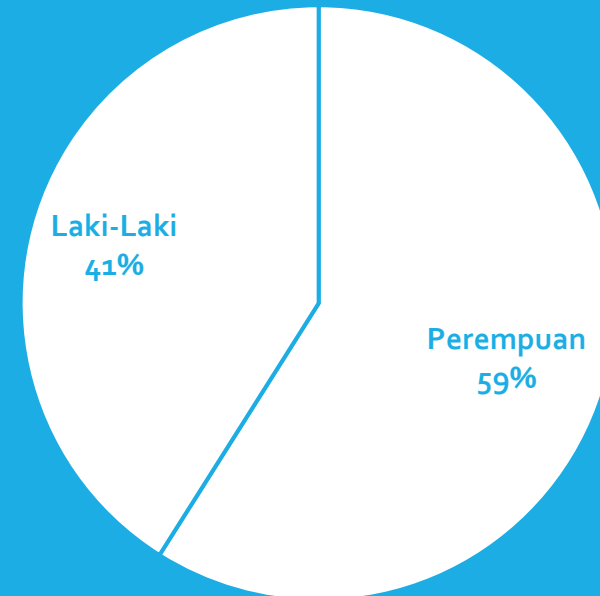
Lokasi kami di kota surabaya, kelurahan mulyorejo, kecamatan mulyorejo.

**-Kota Surabaya, 8 Juli 2021**

saya sudah hampir beberapa harian mengalami gejala covid 19 seperti sesak nafas, kehilangan penciuman, dan batuk2. hari ini saya coba tes swab antigen dan hasilnya positif. setelah itu saya dirujuk ke beberapa rumah sakit terdekat karena kebetulan saya ada asma. namun sudah hampir 5 rs rujukan didatangi tapi tdk menerima karena alasan penuh. hingga akhirnya saya coba isolasi mandiri. sudah 3 hari saya isolasi mandiri sambil menunggu adanya rumah sakit yang mau menerima. inipun dengan stigma buruk masyarakat seperti diomongin ketika saya berjemur. mau menyalahkan tapi ke siapa? yang saya harapkan, adalah mohon kepada seluruh warga Indonesia, tolong saling membantu, baik dari segi fisik (menjaga agar tidak menulari atau ditulari orang lain) ataupun psikis.

**- Garut, 9 Juli 2021.**

## STIGMA



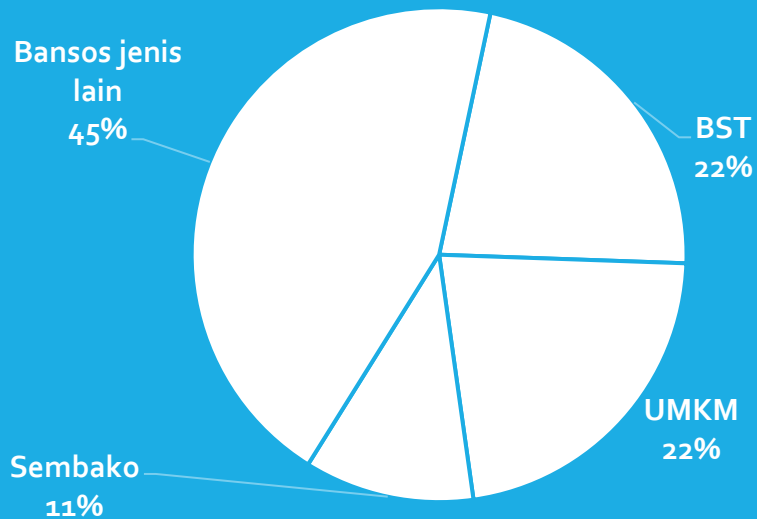
Saya akan segera menikah. Di desa saya, mengizinkan adanya resepsi pernikahan meskipun dengan prokes. Alhasil, orangtua saya bersikeras mengadakan resepsi. Saya adalah nakes. Tapi sungguh susah merubah pemikiran orangtua saya. Padahal saya hanya ingin cukup akad saja demi kesehatan dan keamanan bersama. Namun mereka sulit sekali di beri pengertian. Saya benar2 stress. Saya yg lebih tau kondisi lapangan, namun mereka cukup egois. Saya harus bagaimana? Menunda akad tidak mungkin. Sepertinya kalau pihak desa benar2 tegas dan disiplin mereka baru jera. Saya bingung 🙄🙄

**-Jombang, 18 Juli 2021**

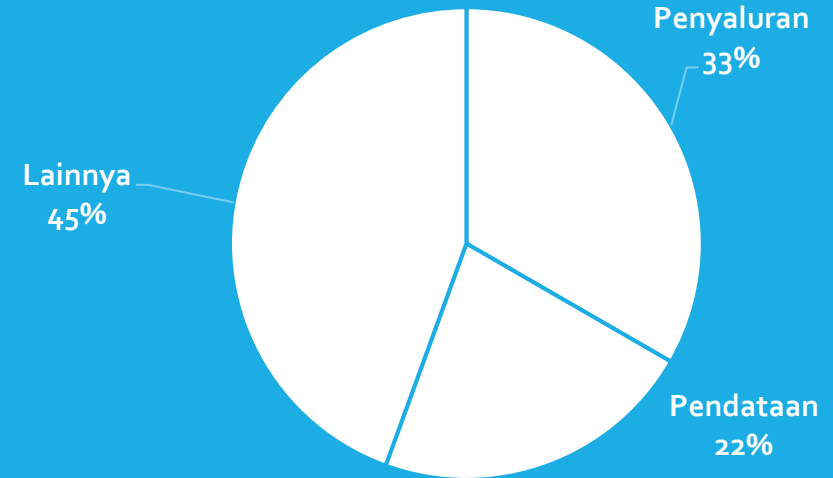
# BANSOS

(n=16)

## JENIS BANSOS



## MASALAH DI:



Saya ojol, keluarga saya kena covid terpaksa saya gak menarik penumpang, adakah bantuan untuk 10 hari ke depan?

- Kota Tasikmalaya, 3 Juli 2021

Nama saya Axx Nxx dengan alamat KTP di Jl. xxxx xxx xxx Meruya Selatan - Kembangan Jakarta Barat. Dari awal pademic tahun lalu sampai sekarang saya sekeluarga belum menerima sama sekali BANSOS

- Jakarta Barat, 18 Juli 2021

# Rekomendasi

- Banyaknya pelanggaran PPKM menunjukkan bahwa PPKM tidak terlalu efektif.
- Penertiban dan penegakan penyekatan beserta sanksinya tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa ada kompensasi jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari.
- Penerapan PPKM harus dilakukan bersamaan dengan jaminan kebutuhan masyarakat.
- Pengurangan kapasitas WFO bagi sektor esensial (maksimal 35%) diperlukan. Pemerintah wajib menertibkan perusahaan atau perkantoran, baik swasta atau negeri dan melihat kondisi secara teliti di dalam perusahaan/kantor tersebut.
- Penerapan PPKM harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment) secara konsisten.